



BerAKHLAK

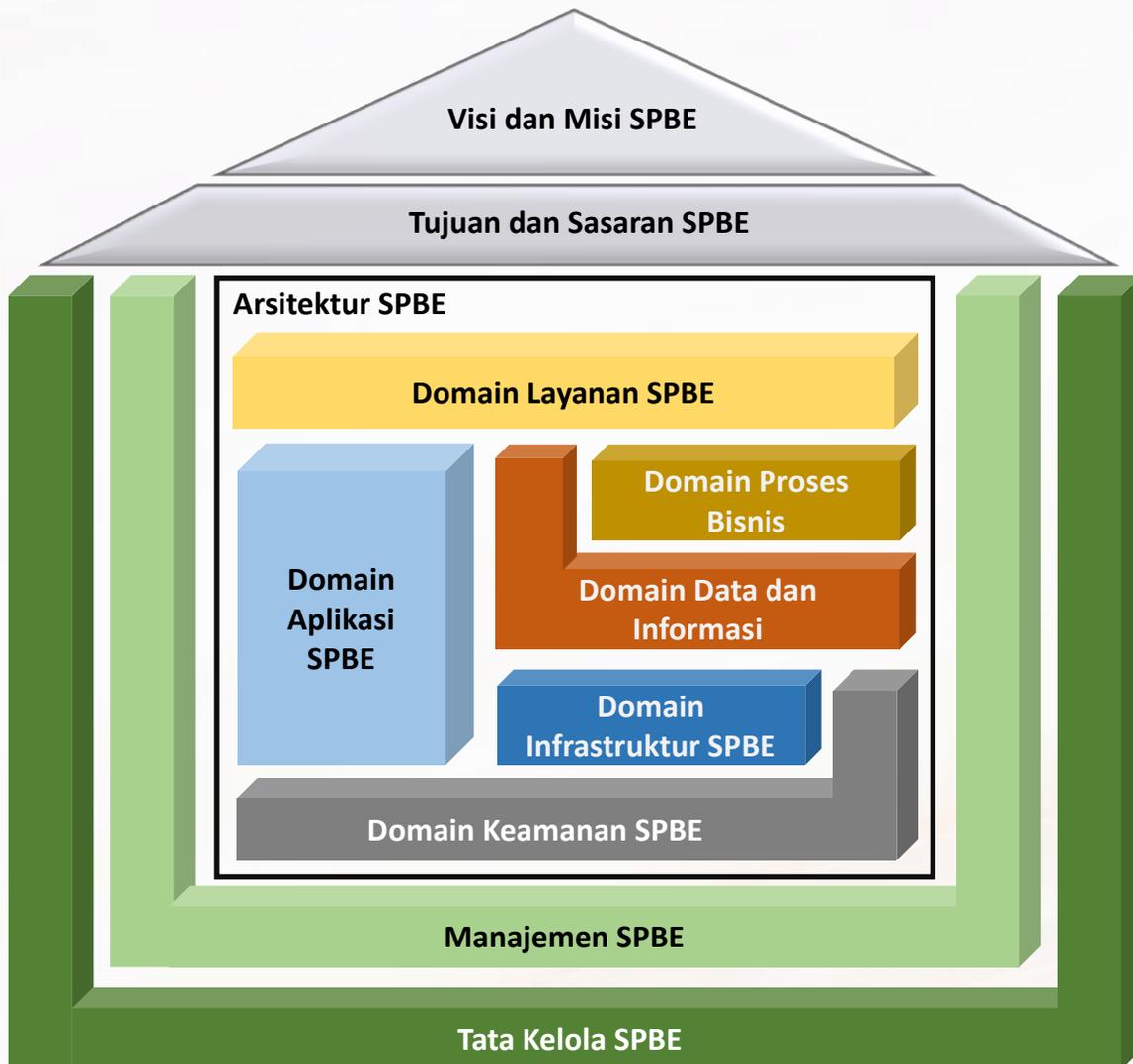
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DOMAIN PROSES BISNIS DAN DOMAIN LAYANAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2023

bangga
melayani
bangsa

ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

TERDIRI DARI

- Arsitektur SPBE Nasional
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

INSTANSI PENGAMPU MASING-MASING DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



DOMAIN
PROSES BISNIS

DOMAIN
LAYANAN SPBE



Kementerian PPN/
Bappenas

DOMAIN DATA
& INFORMASI



KEMKOMINFO

DOMAIN
APLIKASI SPBE

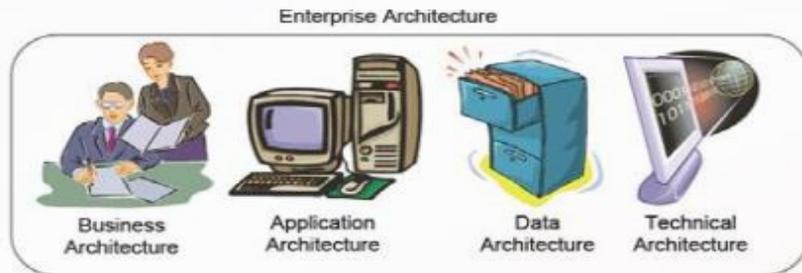
DOMAIN
INFRASTRUKTUR
SPBE



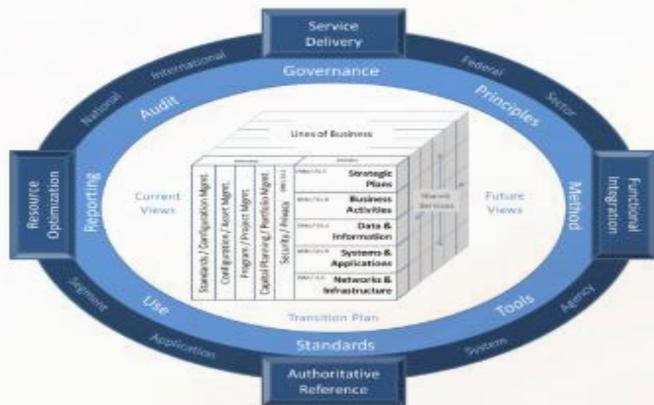
DOMAIN
KEAMANAN
SPBE

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

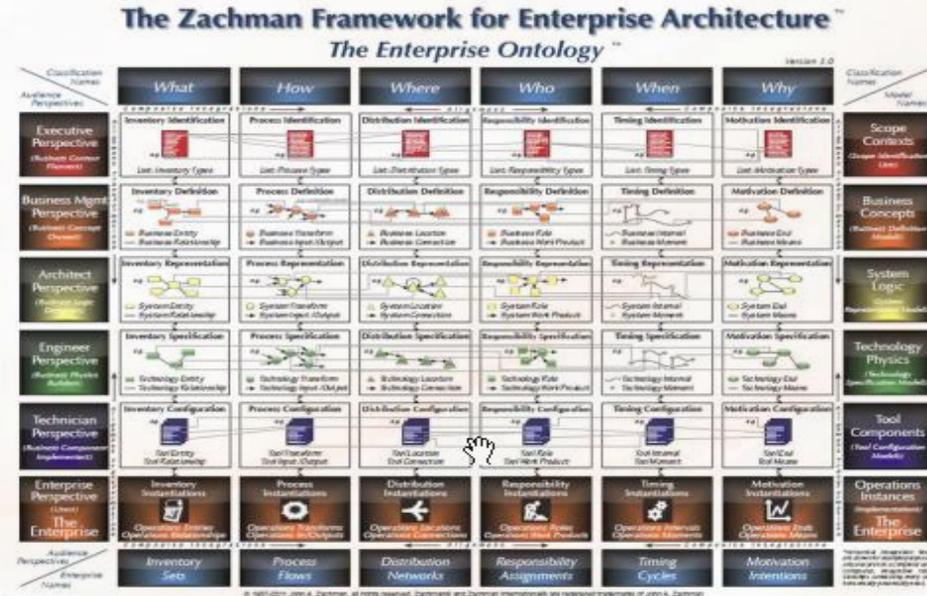
Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi, sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.



TOGAF (sumber : opengroup.org)



FEAF (sumber : CIO, 2012)

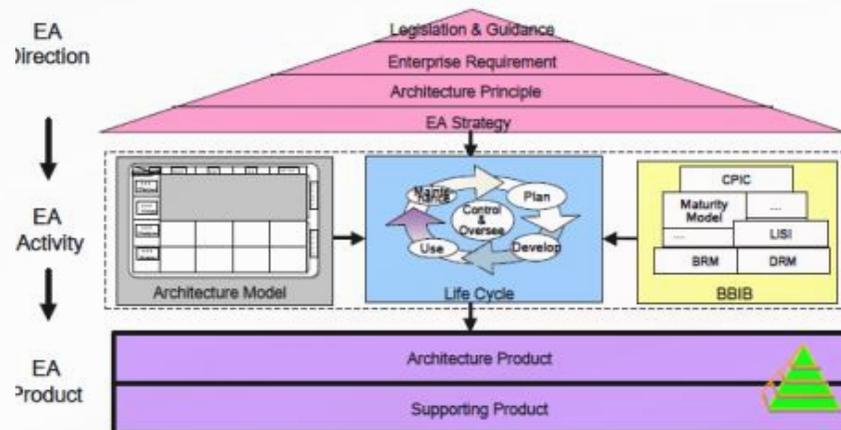


ZACHMAN v.3 (sumber : www.zifa.com)

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Pada umumnya setiap negara menyusun **Government Enterprise Architecture (GEA)** sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan secara spesifik.

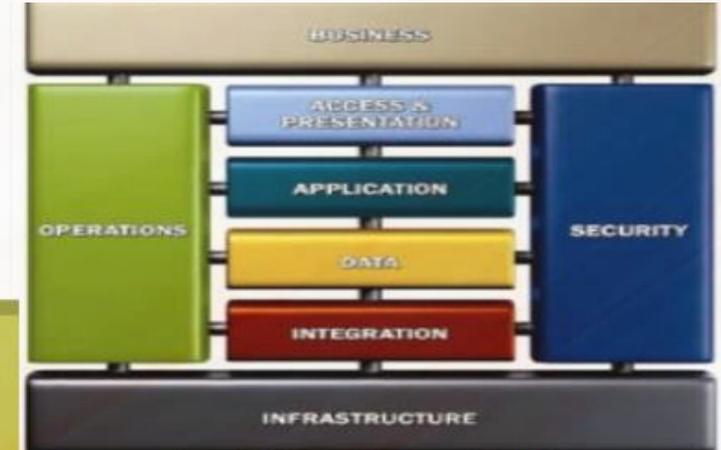
GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.



GEAF (Korea) Sumber : song, hee joon, 2006

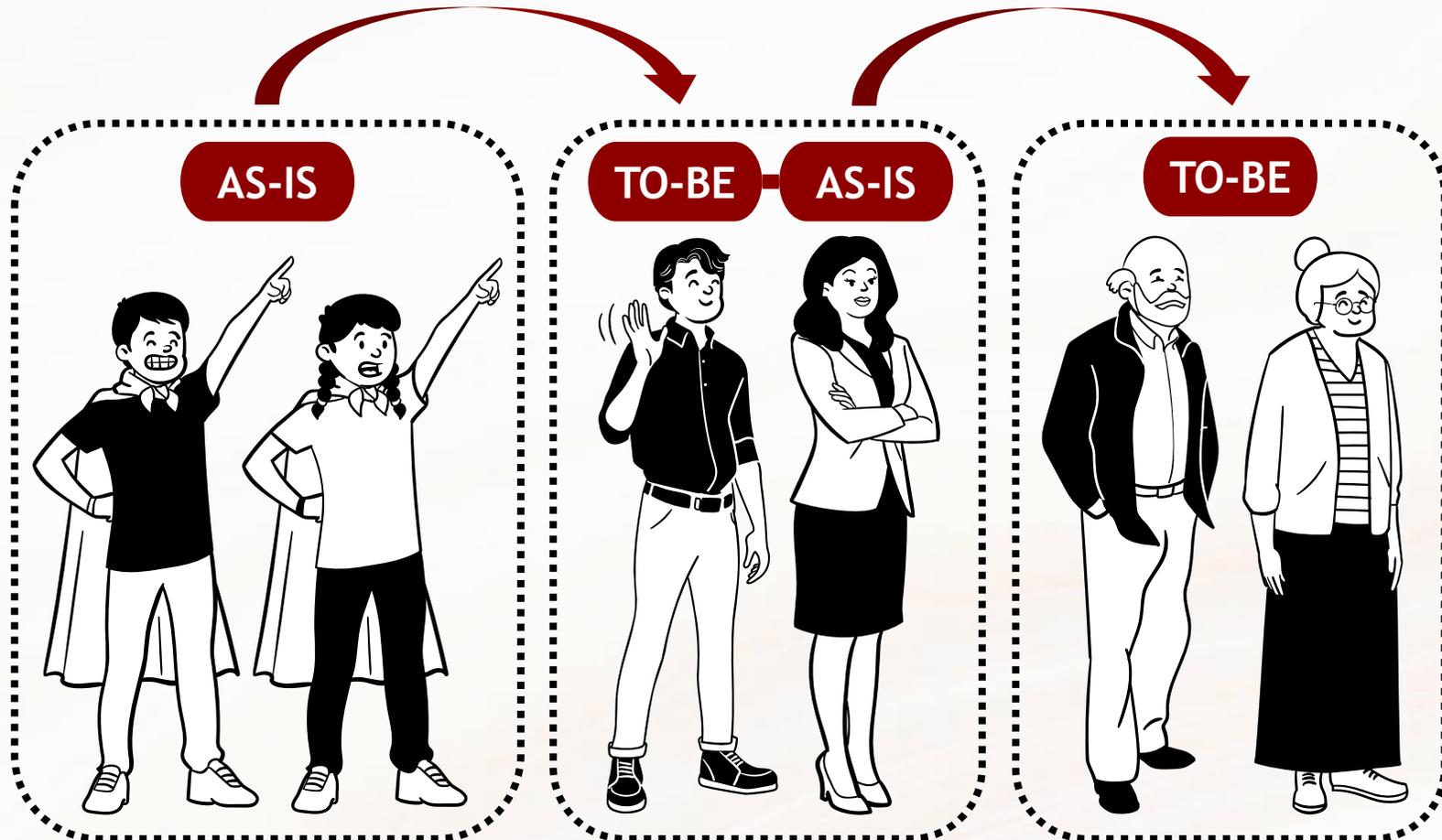


Canada, Sumber : Weisman, 2004



Abu Dhabi IT A&S Framework, Sumber : Abu Dhabi SIC, 2013

PERSONAL/INDIVIDUAL ARCHITECTURE (ANALOGI)



TANPA ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



SILO

DUPLICATION

NON-STANDARD



DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



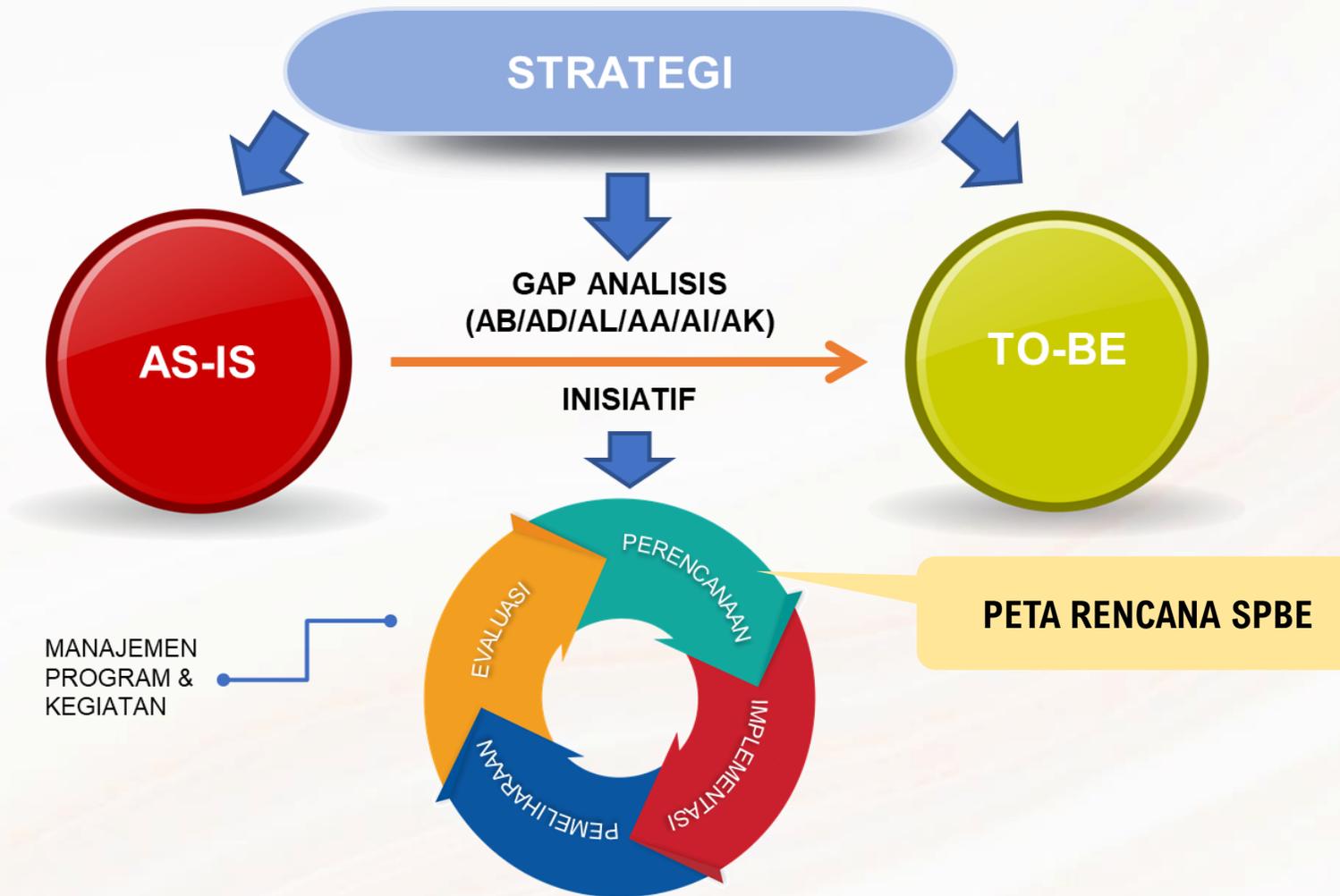
CITIZEN-CENTRIC

EFFECTIVE &
EFFICIENT

INTEGRATED

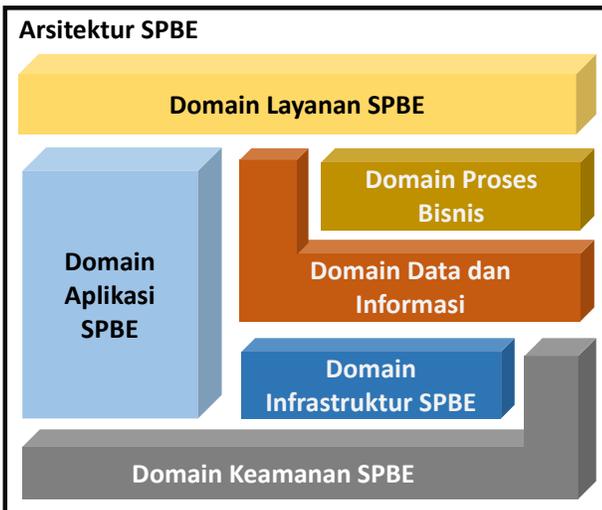


ARSITEKTUR SPBE & PETA RENCANA SPBE



APA YANG HARUS DISUSUN OLEH INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

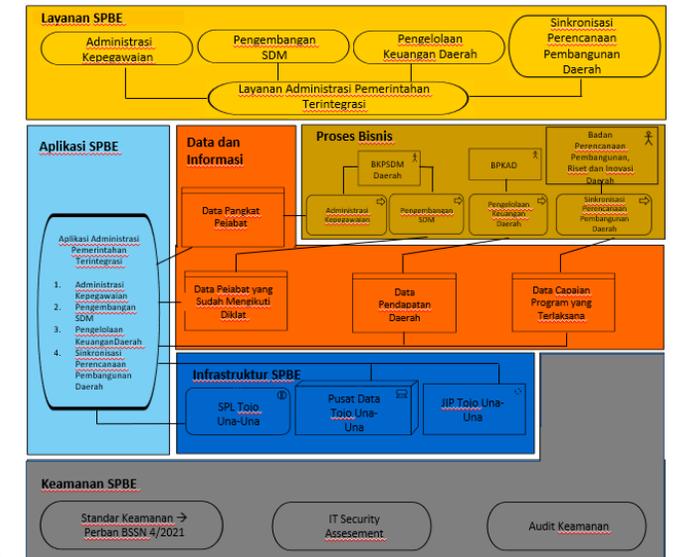
DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (AS-IS)



DOKUMEN PETA RENCANA SPBE

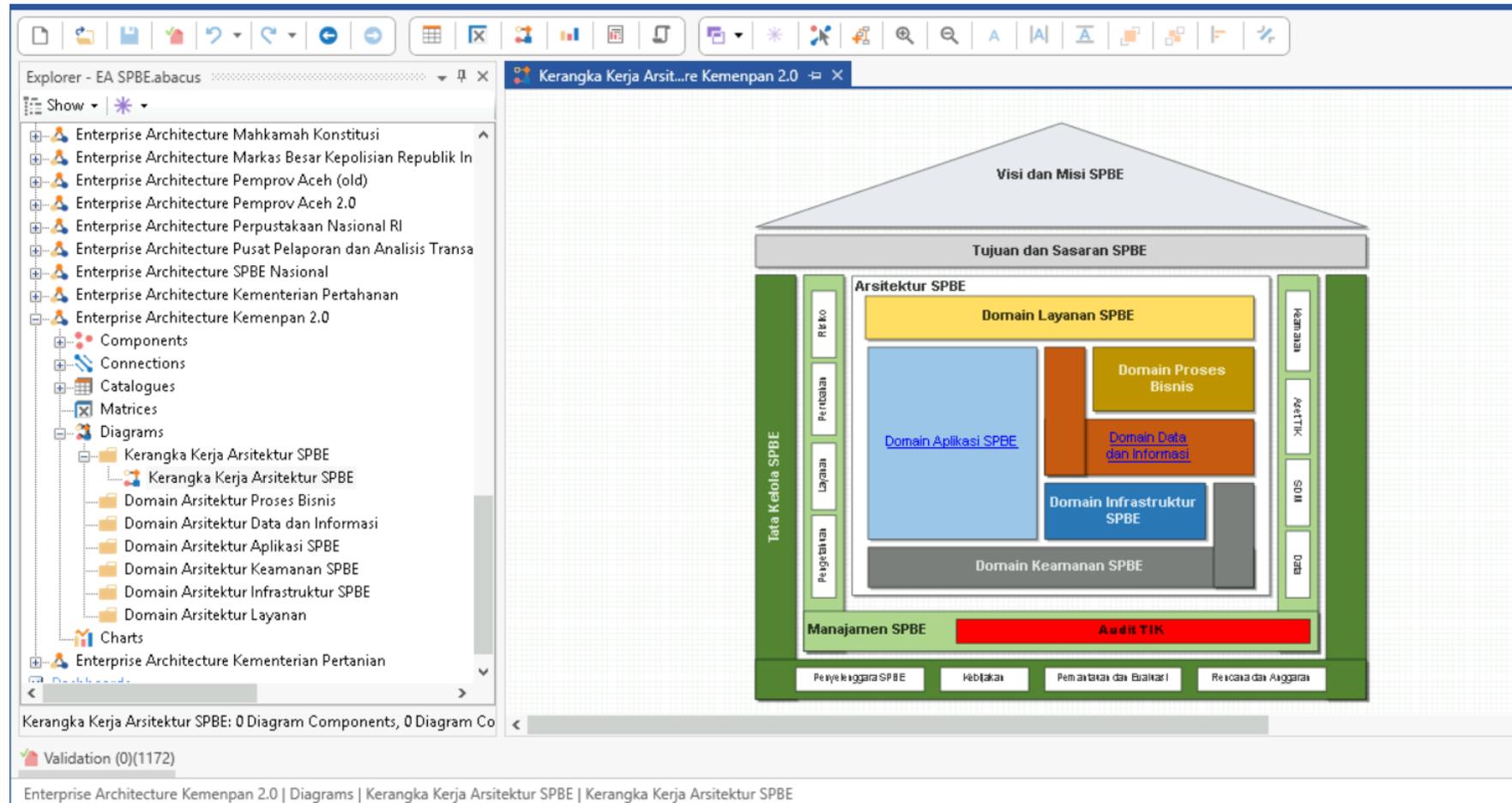
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Layanan SPBE
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan SPBE
Audit TIK

DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (TO-BE)



SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE

**Under Construction*



Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE



The screenshot displays the Enterprise Architect software interface. On the left, the 'Explorer' pane shows a tree view of the 'Domain Arsitektur' structure, including 'Standards', 'Types', 'Viewpoints', 'Templates', and 'Architectures'. A blue callout box labeled 'Domain Arsitektur' points to the 'Standards' folder. Below it, another blue callout box labeled 'Referensi' points to the 'RAB' folder under 'Domain Arsitektur Proses Bisnis'. The main workspace shows a table with columns: 'ID Proses Bisnis', 'Nama Bisnis/Urusan', 'Uraian Proses Bisnis', and three dependency columns. A blue callout box labeled 'Metadata' points to the 'Uraian Proses Bisnis' column. The right-hand side features two property windows: 'New Proses Bisnis As Is 1 - General' and 'New Proses Bisnis As Is 1 - Properties'. The 'General' window shows fields for 'Type', 'Standards', 'Description', 'Created', and 'Modified'. The 'Properties' window shows a table with 13 items, including 'ID Domain Proses Bisnis'.

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
	New Proses Bisnis As Is 1		RAB_06 Pendidikan dan Tenaga Kerja		RAB_01.0

Name	Value	Unit	Data Type	Modified	Created
Information - 13 item(s)					
ID Domain Proses Bisnis			Text	Super Admin	5/10/2022 3:41:24 AM
ID ...			Text	Super Admin	5/10/2022 ...

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL



Domain Arsitektur Proses Bisnis_R1 - Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Foxit PDF Tell me what you want to do

Clipboard: Cut, Copy, Paste, Format Painter

Font: Microsoft Sans Ser, 8,5, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color

Alignment: Wrap Text, Merge & Center

Number: Text

Styles: Fill, Clear

Cells: Insert, Delete, Format

Editing: AutoSum, Sort & Filter, Find & Select

Formula Bar: H14

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Usuan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	RAB Level 5 (Dependency)	RAB Level 6 (Dependency)	Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
Aceh-01	Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan	Tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	RAB.04.01.01 Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan				Dinas Kesehatan		
Aceh-01.01	Kesehatan Masyarakat			RAB.04.01.01.01 Kesehatan Masyarakat					
Aceh-01.01.01	Kesehatan Keluarga dan Gizi				RAB.04.01.01.01.01 Kesehatan Keluarga dan Gizi				
Aceh-01.01.02	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				RAB.04.01.01.01.02 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				
Aceh-01.01.03	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				RAB.04.01.01.01.03 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				
Aceh-01.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				RAB.04.01.01.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
Aceh-01.02.01	Surveilans dan Imunisasi					RAB.04.01.01.02.01 Surveilans dan Imunisasi			
Aceh-01.02.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular					RAB.04.01.01.02.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			
Aceh-01.02.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa					RAB.04.01.01.02.03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa			
Aceh-01.03	Pembinaan Pelayanan Kesehatan				RAB.04.01.01.03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
Aceh-01.03.01	Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional					RAB.04.01.01.03.01 Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional			
Aceh-01.03.02	Pelayanan Kesehatan					RAB.04.01.01.03.02 Pelayanan			

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DOMAIN PROSES BISNIS

 bangga
melayani
bangsa



DASAR HUKUM PROSES BISNIS:

PERATURAN MENTERI PANRB

NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

INSTANSI PEMERINTAH

DEFINISI PROSES & DEFINISI PROSES BISNIS

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*

[Pasal 1 angka 4, Permen PANRB 19/2018]

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang *terstruktur*

dan saling terkait dalam *pelaksanaan tugas dan fungsi*

instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing

[Pasal 1 angka 14, Perpres 95/2018]



DEFINISI PETA PROSES BISNIS

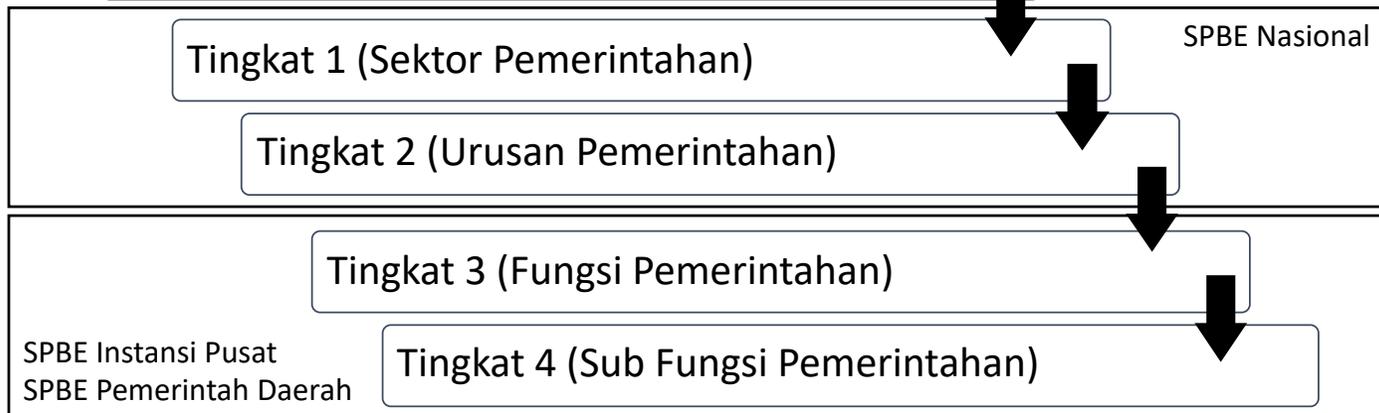


Peta Proses Bisnis adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien **antar unit organisasi** untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan **tujuan pendirian organisasi** agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

[Pasal 1 angka 1, Permen PANRB 19/2018]

REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Referensi Arsitektur Proses Bisnis



STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - Urusan luar negeri
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - Pariwisata
RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02 - Keamanan RAB.05.03 - Hak asasi manusia
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 - Pendidikan RAB.06.02 - Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05 - Pemuda RAB.06.06 - Olahraga
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup
RAB.08 - Budaya dan Agama	RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan
RAB.09 - Pemerintahan Umum	RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

MENENTUKAN REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



Referensi Arsitektur Proses Bisnis tidak selalu bergantung pada struktur instansi pemerintah.

Dengan kata lain, suatu instansi pemerintah mungkin saja mengacu kepada lebih dari 1 (satu)

Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

Contoh: Proses Bisnis di Kementerian PANRB tidak selalu mengacu pada RAB.09.06 Aparatur Negara,

Proses Bisnis yang berkaitan dengan hukum, misalnya, tetap mengacu pada RAB.05.01 Hukum.

CONTOH TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR SPBE MENGUNAKAN ANALOGI BIOLOGI

ID	NAMA (SPESIES)	LEVEL 1 (KINGDOM)	LEVEL 2 (KELAS)	LEVEL 3 (ORDO)	LEVEL 4 (SPESIES)
BIOLOGI-DAB.01.01.01.01	Kucing (Felis Catus)	RAB.01 Animalia	RAB.01.01 Mammalia	RAB.01.01.01 Carnivora	RAB.01.01.01.01 Felis Catus
BIOLOGI-DAB.01.01.02.01	Kuda (Equus Ferus)	RAB.01 Animalia	RAB.01.01 Mammalia	RAB.01.01.02 Perissodactyla	RAB.01.01.02.01 Equus Ferus

ID	Nama Bisnis / Urusan	RAB Level 1 (sektor pemerintahan)	RAB Level 2 (urusan pemerintahan)	RAB Level 3 (fungsi pemerintahan)	RAB Level 4 (sub fungsi pemerintahan)
TUU-DAB.03.04.05.01	Pengembangan Perumahan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	RAB.03.04.05.01 Pengembangan Perumahan

CONTOH KASUS TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



Suatu buku berjudul **Hukum Ekonomi** harus diletakkan pada **suatu rak buku**.

Di manakah buku tersebut harus diletakkan?

Pada rak yang berisi buku-buku terkait **hukum** atau terkait **ekonomi**?

Siapa yang berhak menentukannya?

REMINDER: Suatu komponen muatan Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis tidak boleh mengindikasikan pada lebih dari 1 (satu) pengelompokan.

PENYELESAIAN CONTOH KASUS

Dalam hal kita ragu menentukan di mana seharusnya buku tersebut diletakkan (dengan kata lain: pada pengelompokan mana suatu komponen Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis menginduk), kita dapat melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

- **Mencari unsur yang lebih dominan** (dalam contoh, unsur hukum lebih dominan, sehingga buku Hukum Ekonomi lebih tepat diletakkan pada rak yang berisi buku-buku terkait hukum).
- **Membaginya menjadi 2 (dua) komponen Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis** agar dapat masuk ke masing-masing induk pengelompokan.



ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR PROSES BISNIS



No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata. Contoh: PANRB-DAB.01.01.01
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan deskripsi/uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis. Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.
6	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan (pada tahun terakhir dari dokumen sumber IKU).
7	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang telah dicapai (pada tahun di mana dokumen Arsitektur SPBE disusun).
8	Unit Kerja	Merupakan unit kerja yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.
9	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih.
10	Instansi	Merupakan instansi yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DOMAIN LAYANAN SPBE

 **bangga
melayani
bangsa**



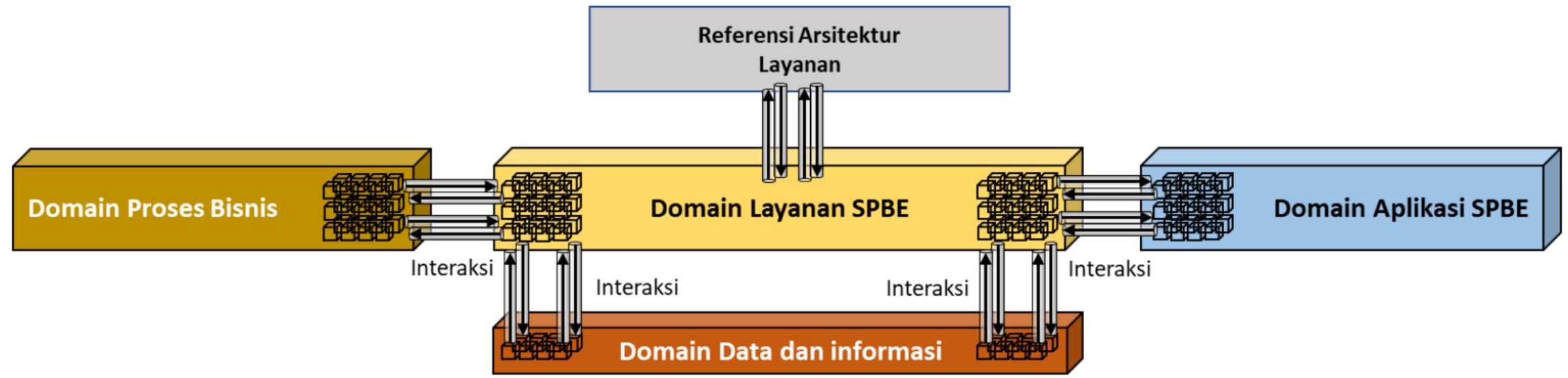
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

[Pasal 1 angka 4, Perpres 95/2018]

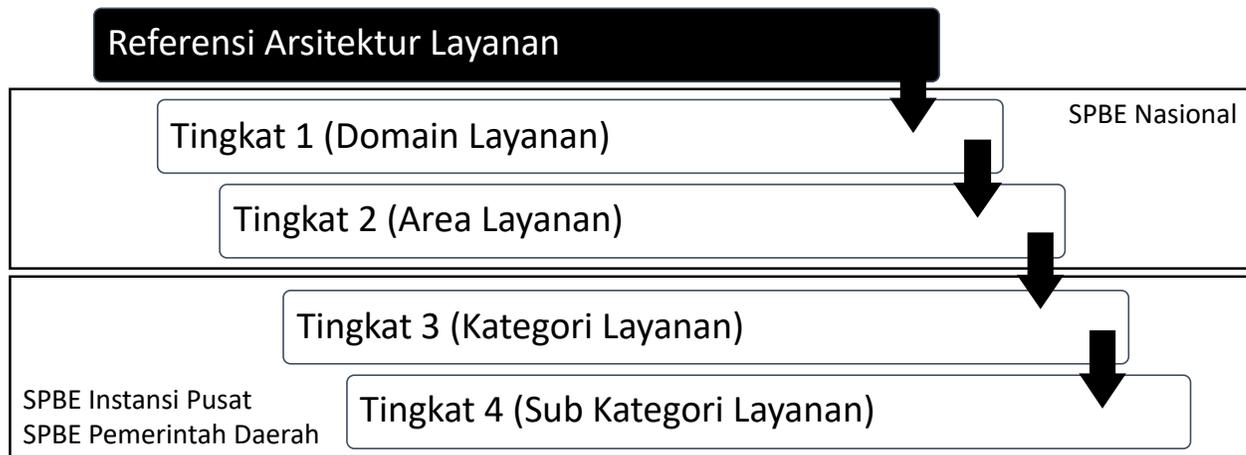
Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

[Pasal 1 angka 26, Perpres 95/2018]

RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN LAYANAN SPBE



REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

Tingkat 1 (Domain Layanan)	Tingkat 2 (Area Layanan)
RAL.01 Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> RAL.01.01 Pertahanan RAL.01.02 Urusan Luar Negeri RAL.01.03 Keneqaraan RAL.01.04 Ekonomi RAL.01.05 Industri RAL.01.06 Perdaqaanqan RAL.01.07 Pertanian RAL.01.08 Perkebunan RAL.01.09 Peternakan RAL.01.10 Perikanan RAL.01.11 Badan Usaha Milik Neqara RAL.01.12 Investasi RAL.01.13 Koperasi RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menenqah RAL.01.15 Pariwisata RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi RAL.01.17 Pekerjaan Umum RAL.01.18 Transmiqrasi RAL.01.19 Transportasi RAL.01.20 Perumahan RAL.01.21 Pemanqunan Kawasan atau Daerah Tertinqal RAL.01.22 Pertanahan RAL.01.23 Kependudukan RAL.01.24 Pemerintahan daerah RAL.01.25 Kesehatan RAL.01.26 Sosial RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan RAL.01.28 Hukum RAL.01.29 Keamanan RAL.01.30 Hak Asasi Manusia RAL.01.31 Pendidikan RAL.01.32 Ketenaaqakerjaan RAL.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAL.01.34 Pemuda RAL.01.35 Olahraga RAL.01.36 Pertambangan RAL.01.37 Energi RAL.01.38 Kehutanan RAL.01.39 Kelautan RAL.01.40 Lingkungan Hidup RAL.01.41 Aqama RAL.01.42 Kebudayaan RAL.01.43 Informasi RAL.01.44 Komunikasi
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RAL.02.01 Dalam Neqeri RAL.02.02 Keuangan RAL.02.03 Perencanaan Pemanqunan Nasional RAL.02.04 Aparatur Neqara RAL.02.05 Kesekretariatan Neqara RAL.02.06 Dukunqan Operasional Orqanisasi RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja RAL.02.08 Orqanisasi dan Tata Kelola RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan

ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



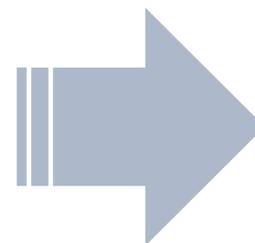
No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	penjelasan tujuan dari layanan.
4	Fungsi Layanan	uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan.
5	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan.
6	Kementerian/Lembaga terkait (Dependency)	kementerian/lembaga terkait dengan layanan.
7	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan.
8	Target Layanan (Dependency)	target pengguna layanan.
9	Metode Layanan	model dari layanan (Elektronik atau Non Elektronik).
10	Potensi Manfaat	manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
11	Potensi Ekonomi	kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE.
12	Potensi Risiko	potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE.
13	Mitigasi Risiko	mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE.
14	Proses Bisnis (Dependency)	proses bisnis yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.
15	Kode Model Referensi	kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih.
16	Instansi	instansi yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.

ATRIBUT METADATA LAYANAN

POTENSI EKONOMI-POTENSI RISIKO



11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE



Analisis Biaya-Manfaat (CBA)

Digunakan untuk melakukan justifikasi dalam pengembangan layanan elektronik ke depan

No	Atribut Metadata	Komponen Perhitungan	Satuan Konversi
12	Potensi Ekonomi	Direct benefit, indirect benefit, intangible benefit, competitive benefit Contoh: <u>Penyediaan layanan digital aparatur negara</u> (Kuantifikasi potensi manfaat dari 4 juta ASN yang sebelumnya melakukan pelatihan fisik dengan biaya 1 juta/orang, maka terdapat potensi penghematan sebesar 4 trilyun bila dilakukan secara online)	Rupiah
13	Potensi Risiko	Direct cost, indirect cost, intangible cost, opportunity cost Contoh: <u>Proses migrasi layanan transaksi elektronik keuangan dalam transaksi penerimaan negara, dengan jumlah transaksi 24 milyar/hari</u> (potensi risiko, bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan migrasi, maka potensi risiko kehilangan potensi penerimaan negara sebesar 1 milyar/jam)	Rupiah

PENILAIAN EVALUASI SPBE

INDIKATOR 11 – ARSITEKTUR SPBE



Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
 Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

PENILAIAN EVALUASI SPBE

INDIKATOR 11 – ARSITEKTUR SPBE



Nilai Tingkat kematangan	Kriteria
3	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKT
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R
BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

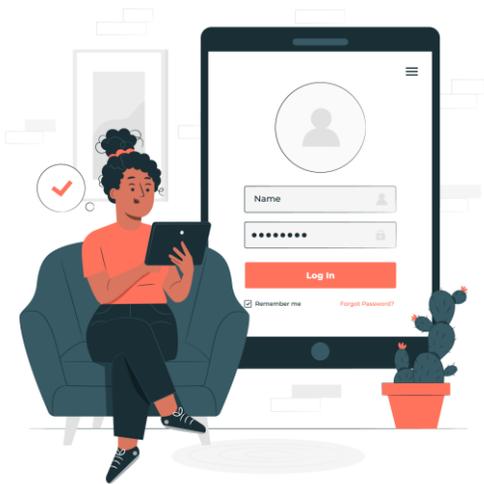
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan

48

Kategori Layanan	ID Layanan	Nama Layanan (Sub Kategori)	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian / Lembaga Terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Metadana Terkait
	02.06.01.06	Layanan pendukung keputusan perumusan kebijakan pelayanan publik	Menganalisis isu strategis dan melakukan kajian kebijakan pelayanan publik berdasarkan dukungan informasi dari ragam media	Merekendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan pengetahuan stakeholder dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik	Dukungan Operasional Organisasi (RL-02.06)	Deputi Bidang Pelayanan Publik	As.Dep.I dan II	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL-02)	Unit Kerja	Government to Government	PAN-01.06; Aplikasi baru dan/ atau aplikasi dukungan;
	02.06.01.07	Layanan pendukung keputusan perumusan kebijakan reformasi birokrasi	Menganalisis isu strategis dan melakukan kajian kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan dukungan informasi dari ragam media	Merekendasikan kebijakan yang kolaboratif berdasarkan pengetahuan stakeholder dalam merumuskan kebijakan reformasi birokrasi	Dukungan Operasional Organisasi (RL-02.06)	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	As.Dep.I	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL-02)	Unit Kerja	Government to Government	PAN-01.07; Aplikasi baru dan/ atau aplikasi dukungan;
Sosialisasi Kebijakan Terkait PANRB (02.08.01)	02.08.01.01	Layanan pengkoordinasian kegiatan lintas organisasi/ instansi terkait implementasi	Mewujudkan pelaksanaan pelaksanaan aktivitas implementasi kebijakan kelembagaan pemerintah pada seluruh	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan (konsultasi) dari seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan terkait implementasi kebijakan	Organisasi dan Tata Kelola (RL-02.08)	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	As.Dep.III, IV dan V	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL-02)	K/L/ Pemd	Government to Government	PAN-02.01; Aplikasi baru dan/ atau aplikasi dukungan;

Bukti dukung ini diupload dengan pengesahan pejabat berwenang, dan seluruh domain arsitektur dan referensi sudah terisi

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL



TERIMA KASIH

“Sinergi dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* terkait sangat menentukan keberhasilan penerapan SPBE.”

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif